



RENCANA KERJA

2024



DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 telah selesai disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan rencana kerja satu tahun yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan mengacu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak 2024-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mendukung dalam mewujudkan tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya

Pontianak, Mei 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pontianak

Drs. ZULKARNAIN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	9
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	21
Tabel II.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026	25
Tabel II.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	30
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.....	40
Tabel III.1	Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Terhadap RPD Kota Pontianak.....	42
Tabel III.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025... Error! Bookmark not defined.	
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bedasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik sektoral. Urusan tersebut di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ketiga Kota Pontianak yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan komunitas berbasis potensi lokal. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 berpedoman kepada RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 dan Renstra perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Tujuan Kota Pontianak yaitu “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran Kota Pontianak yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”, melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan mengevaluasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 19);
27. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 21);
28. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
29. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 16.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Menterjemahkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam dokumen perencanaan tahunan, yang berisikan program kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2024. Dengan demikian, Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan.

2. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk pelaksanaan tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah adalah:

1. Memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2024 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia;
2. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
3. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
4. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting dalam Pelayanan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan indikatif Perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2024.

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan dan anggaran. Realisasi kinerja kegiatan dan anggaran merupakan evaluasi dari rencana kerja tahun 2021, 2022 dan target tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Untuk mewujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana dapat tergambar pada tabel 2.1.

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2020-2024 di atas dapat kita lihat rata-rata semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 16.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	90 Persen	Persen	Persen	Persen		70 Persen	0 Persen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	15 Media	Media	Media	Media		13 Media	0 Media	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 05.	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	Layanan	Layanan	Layanan		4 Layanan	0 Layanan	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2. 16. 02. 2. 01. 08.	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2. 01. 11.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	98,51 Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	95,52 Persen	0 Persen	0,00%
2. 16. 03. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	PD	PD	PD	PD	32 PD	0 PD	0,00%
2. 16. 03. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%
2. 16. 03. 2. 02.	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	PD	PD	PD	PD	32 PD	0 PD	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2. 16. 03. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	3 Unit	0 Unit	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 08.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	5 Layanan	0 Layanan	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 09.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 10.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 16. 03. 2. 02. 12.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 20.	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	69,23 Persen	Persen	Persen	Persen		53,85 Persen	0 Persen	0,00%
2. 20. 02. 2. 01.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	Persen	Persen	Persen		100 Persen	0 Persen	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	Orang	Orang	Orang		32 Orang	0 Orang	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	Orang	Orang	Orang		32 Orang	0 Orang	0,00%
2. 20. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2. 21.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN									
2. 21. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	35,48 Persen	Persen	Persen	Persen	21,88 Persen	0 Persen	0,00%	
2. 21. 02.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	44,78 Persen	Persen	Persen	Persen	26,87 Persen	0 Persen	0,00%	
2. 21. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
2. 21. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2. 21. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00%
2. 21. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00%
2. 21. 02. 2. 02.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	79,13 Persen	Persen	Persen	Persen		47,88 Persen	0 Persen	0,00%
2. 21. 02. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		5 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00%
	NON URUSAN									
X. XX. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	Persen	Persen	Persen		95 Persen	0 Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persen	Persen	Persen		100 Persen	0 Persen	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
X. XX. 01. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		6 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persen	Persen	Persen		100 Persen	0 Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	orang / bulan	orang / bulan	orang / bulan		31 orang / bulan	0 orang / bulan	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
X. XX. 01. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 02. 05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	36 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	100 Persen	0 Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 05. 02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	paket	paket	paket	paket	1 paket	0 paket	0,00%
X. XX. 01. 2. 05. 09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	orang	orang	orang	orang	3 orang	0 orang	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
X. XX. 01. 2. 06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	Persen	Persen	Persen		100 Persen	0 Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	paket	paket	paket		1 paket	0 paket	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	paket	paket	paket		8 paket	0 paket	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	paket	paket	paket		1 paket	0 paket	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 06. 11.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
X. XX. 01. 2. 07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Persen	Persen	Persen		100 Persen	0 Persen	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
X. XX. 01. 2. 07. 05.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26	unit	unit	unit	unit		16	unit	0	unit	0,00%
X. XX. 01. 2. 07. 06.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87	unit	unit	unit	unit		20	unit	0	unit	0,00%
X. XX. 01. 2. 08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	Persen	Persen	Persen		100	Persen	0	Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 08. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		1	Laporan	0	Laporan	0,00%
X. XX. 01. 2. 09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	Persen	Persen	Persen		100	Persen	0	Persen	0,00%
X. XX. 01. 2. 09. 02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	unit	unit	unit		2	unit	0	unit	0,00%
X. XX. 01. 2. 09. 06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	unit	unit	unit		92	unit	0	unit	0,00%

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2022)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
X. XX. 01. 2. 09. 09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	unit	unit	unit		1 unit	0 unit	0,00%

Tahun anggaran 2024 merupakan awal tahun perencanaan untuk dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Sehingga belum dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja dan anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai RPD Kota Pontianak tahun 2024 – 2026 pada tujuan ke 3 (ketiga) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengampu untuk 3 bidang urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistic sektoral dan urusan persandian.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal maupun indikator penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana PERMENDAGRI 18 Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 2.2.

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
				Baik (3,31)	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik (3,06)	Indeks	Baik (3,31)	Indeks	Baik (3,26)	Indeks	Baik (3,31)	Indeks	
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		IKU Kota	Baik (3,31)	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik (3,06)	Indeks	Baik (3,31)	Indeks	Baik (3,26)	Indeks	Baik (3,31)	Indeks	
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik		IKU Perangkat Daerah	90,32	persen	90,63	persen	93,75	persen	100	persen		Persen	90,32	persen	90,32	persen	90,63	persen	
I	Urusan Komunikasi dan Informatika																			
I.1.	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE		Indikator Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	93,28	Persen	95,52	Persen	97,01	Persen	98,51	Persen	0	Persen	91,79	Persen	93,28	Persen	95,52	Persen	
I.1.1.	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		IKK Output I.1	10	OPD	10	OPD	5	OPD	10	OPD	2	OPD	5	OPD	5	OPD	10	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.2.	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah		IKK Output I.3	5	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	0	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.3.	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah		IKK Output II.2	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	Domain / sub domain	163	domain / sub domain	65	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
I.1.4.	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan		IKK Output II.6	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	2	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.5.	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		IKK Output II.7	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.6.	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		IKK Output II.8 dan IKK Output II.9	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.1.7.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City		IKK Output II.12	27	OPD	27	OPD	25	OPD	27	OPD	0	OPD	24	OPD	25	OPD	27	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik		Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik	58,23	Persen	70	Persen	80	Persen	90	Persen	0	Persen	58,23	Persen	60	Persen	70	Persen	
I.2.1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		IKK Outcome III.1	96	Persen	96	persen	93	Persen	96	persen	85	persen	89,44	persen	93	persen	96	persen	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.2.	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah		IKK Output III.1	6	komunitas	6	komunitas	6	komunitas	6	komunitas	1	komunitas	6	komunitas	6	komunitas	6	komunitas	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
I.2.3	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi		IKK Output III.2	14	Konten	14	Konten	13	Konten	14	Konten	12	Konten	12	Konten	13	Konten	14	Konten	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
I.2.4	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi		IKK Output III.3	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	1	kali	4	kali	4	kali	4	kali	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
II.	Urusan Statistik Sektoral																			
II.1	Persentase pemenuhan data prioritas daerah		Indikator Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	46,15	persen	53,85	persen	61,54	persen	69,23	persen	0	persen	38,46	persen	46,15	persen	53,85	persen	
II.1.1.	Jumlah Buku Profil Daerah		IKK Output I.1	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	0	buku	100	buku	100	buku	100	buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
II.1.2.	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data		IKK Output I.6	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	0	buku	100	buku	100	buku	100	buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.	Urusan Persandian																			
III.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah		Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	16,13	Persen	21,88	Persen	28,13	Persen	34,38	Persen		Persen	16,13	Persen	16,13	persen	21,88	Persen	
III.1.1.	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		IKK Outcome I.	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	kurang Baik	Indeks	Cukup Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		
III.1.2.	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		IKK Output I.1	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	0	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.1.3.	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah		IKK Output I.2	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	4	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III.1.4.	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah		IKK Output I.3	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan kinerja pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 – 2025 dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tabel 2.3.

Tabel II.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	90,63 %	93,75 %	100%

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, demi mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari berbagai isu strategis / isu penting yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis atau isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu penting atau isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dengan memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sektoral. Sehingga dapat ditetapkan isu penting pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan Smart City, Pembangunan Kota Pontianak sesuai enam pilar pada Smart City (smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society; dan smart environment). Hanya saja perlu dibangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi perkotaan yang handal dalam berbagai layanan di Kota Pontianak
2. Pengembangan Dasar Data Statistik Sektoral Kota Pontianak dengan basis atau data (one data), diperlukan kemudahan akses informasi dan pemanfaatan data secara terpadu.
3. Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) di Kota Pontianak, dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk menerapkan prinsip e Government. Dimana diperlukan:

- a. Menyusun masterplan dan memastikan penetapan proses e-government sebagai dasar penerapan pelayanan e-government
 - b. Integrasi database dan layanan e-government di instansi pemerintah
 - c. Pengembangan layanan masyarakat/ASN yang dilaksanakan oleh OPD berbasis e-government.
 - d. Meningkatkan pelayanan di pontive center dengan pengembangan aplikasi dashboard berbasis e-government
 - e. Mengembangkan infrastruktur, perangkat teknologi informasi dan aplikasi pendukung pelaksanaan Kota Cerdas atau smart city
4. Dalam pelaksanaan egovernment, perlu dibuat suatu model yang dibuat sebagai solusi untuk menganalisis e-Government atau yang dikenal sebagai PeGI, yang mana saat ini index PeGI Nasional sebesar 3,4. PeGI sekarang dikenal dengan Indeks SPBE. Bila tidak dilaksanakan maka penerapan e-government di Kota Pontianak sulit terukur.
5. Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi publik. Dapat dilakukan dengan cara:
- a. Mendorong masyarakat memanfaatkan internet sebagai salah media informasi dan komunikasi konvensional mendukung pembangunan di Kota pontianak
 - b. Mendorong penyebarluasan informasi untuk meningkatkan wawasan masyarakat

Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah. Adapun faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Strength / Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
 - b) Telah tersedianya masterplan SPBE dan masterplan Smart City
 - c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya

program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

e) Adanya sarana dan prasarana

2) Weakness / Kelemahan

a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas

b) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government

c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah

d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

e) Data pelaksanaan kegiatan yang ada kurang lengkap

f) Distribusi penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government di perangkat daerah yang lain yang belum merata

g) Pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih kurang aktif dan efektif

h) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi

i) Adanya kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat

3) Opportunities / Peluang

a) Terdapat Lembaga atau institusi pendidikan di Kota Pontianak yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika

b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi

c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat

d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat

e) Penyelenggaraan statistik sektoral

f) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah

g) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

4) Threats / Ancaman

a) Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi

b) Kebebasan penggunaan media sosial.

c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pontianak smart city

- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

Dari hasil inventaris isu-isu penting dan strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, yang menjadi isu penting dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam penentuan program dan kegiatan prioritas adalah terkait:

- 1) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar PD dalam Pelaksanaan e-government. Hal ini terkait dengan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, tetapi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.
- 2) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah.

Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Terutama terkait dengan kewenangan dan fungsi humas pemerintah daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar dan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi publik dan media sosial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024-2026. Kebutuhan paling mendasar adalah alokasi anggaran untuk penyediaan internet dan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mencapai target nilai indeks SPBE yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Selain itu

alokasi anggaran terkait pengadaan server dan jaringan listrik untuk menunjang operasional data center Pemerintah Kota Pontianak.

Dukungan anggaran sangat dibutuhkan, mengingat pemerintah Kota Pontianak belum memiliki infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk memenuhi komponen penilaian LPPD dan juga Indeks SPBE Kota Pontianak. Alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada RKPD tahun 2024 sudah dapat mengakomodir untuk pembangunan jaringan intra pemerintah tersebut.

Pada tahun anggaran 2024, akan dilaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana tabel 2.4.

Tabel II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
I.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70	Persen	719.466.920	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70	Persen	942.932.720	
I.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13	Media	719.466.920	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13	Media	942.932.720	
I.1.1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	47.432.000	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	171.680.000	Untuk penyewaan lisensi Aplikasi Intelligence Media Management (IMM) selama 1 Tahun
I.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	257.668.900	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	257.668.900	
I.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Dokumen	52.720.580	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Dokumen	52.720.580	
I.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	83.771.160	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	83.771.160	
I.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	133.066.000	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	133.066.000	
I.1.6	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	Dokumen	118.810.000	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	Dokumen	168.027.800	Untuk pelaksanaan workshop/pelatihan KIM dan keikutsertaan dalam kompetisi KIM tingkat nasional/provinsi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
I.1.7	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	25.998.280	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	75.998.280	Untuk pelaksanaan Survei Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan pelaksanaan workshop/ pelatihan Pengelola PPID
II.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95,52	Persen	3.529.530.000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95,52	Persen	3.529.530.000	
II.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32	PD	725.000.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32	PD	725.000.000	
II.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	110.000.000	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	110.000.000	
II.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	615.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	615.000.000	
II.2	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32	PD	2.804.530.000	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32	PD	2.804.530.000	
II.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	2.360.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	2.360.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
II.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	210.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	210.000.000	
II.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	Layanan	100.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	Layanan	100.000.000	
II.2.4	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	50.000.000	
II.2.5	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	48.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	48.000.000	
II.2.6	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	36.530.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	36.530.000	
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85	Persen	461.799.740	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85	Persen	461.799.740	
III.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100	Persen	461.799.740	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100	Persen	461.799.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
III.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	51.432.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	51.432.000	
III.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32	Orang	33.066.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32	Orang	33.066.000	
III.1.3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen	52.720.580	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen	52.720.580	
III.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32	Orang	105.771.160	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32	Orang	105.771.160	
III.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3	Dokumen	218.810.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3	Dokumen	218.810.000	
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88	Persen	81.450.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88	Persen	81.450.000	
IV.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87	Persen	71.450.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87	Persen	71.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
IV.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	7.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	7.000.000	
IV.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Laporan	12.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Laporan	12.000.000	
IV.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	50.000.000	
IV.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5	Perangkat Daerah	2.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5	Perangkat Daerah	2.450.000	
IV.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88	Persen	10.000.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88	Persen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
IV.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5	Perangkat Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5	Perangkat Daerah	10.000.000	
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	Persen	7.445.840.340	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	Persen	7.445.840.340	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	27.512.800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	27.512.800	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	9.926.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	9.926.800	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.644.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.644.600	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4.441.400	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4.441.400	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	5.315.076.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	5.315.076.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	orang / bulan	5.098.887.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	orang / bulan	5.098.887.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	211.320.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	211.320.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.089.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.089.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	3.780.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	3.780.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	80.700.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	80.700.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	62.700.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	62.700.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	18.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	18.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	277.886.719	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	277.886.719	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.864.764	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.864.764	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	145.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	145.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	27.541.955	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	27.541.955	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	8.880.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	8.880.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	70.000.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	17.600.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	17.600.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	300.865.648	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	300.865.648	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	67.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	67.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	233.865.648	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	233.865.648	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	1.337.096.427	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	1.337.096.427	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	232.096.427	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	232.096.427	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	106.702.746	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	106.702.746	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	36.702.746	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	36.702.746	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	
						12.238.087.000						12.461.552.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Pontianak Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara khusus kepada untuk masyarakat yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bersifat sebagai Perangkat Daerah pendukung.

Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Arah kebijakan Kota Pontianak yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dalam bidang urusan pembangunan informasi dan komunikasi dengan meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis E-Government dan meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan TIK, dalam urusan bidang pembangunan persandian dengan meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan untuk urusan bidang statistic sektoral yaitu meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, statistik dan persandian. Urusan tersebut merupakan bagian dari pencapaian tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran Kota Pontianak yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu “Meningkatnya

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mengsinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang pada Misi ke 3 (tiga) “Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”, Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel III.1 Logical Frame Work Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Terhadap RPD Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks SPBE	Baik	Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPBE secara baik	Program Aplikasi Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
						Program Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Bidang Statistik Sektor

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024, merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber

daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam table Logical Frame work. Untuk Tahun 2024, terdapat 4 program urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan 1 program penunjang urusan pemerintah daerah. Seluruh program tersebut diuraikan menjadi 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD.

Terdapat beberapa sub kegiatan yang menjadi prioritas untuk pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024:

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempunyai jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan seluruh Perangkat daerah yang ada.
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dimana terdapat pendanaan untuk akses internet di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dan juga beberapa area public dan juga pengelolaan pusat data. Pada tahun 2024 akan dilakukan pembelian perangkat pada pusat data.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan untuk anggaran dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026, rencana kerja ini upaya dalam pencapaian sasaran kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik.

Target anggaran Rencana Kerja Tahun 2024 dari pagu dari renstra sebesar Rp. 12.238.087.000,00 dan pagu RKPD untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 12.238.087.000,00. Jumlah anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk membangun jaringan intra pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan indeks SPBE Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk itu perlu diambil Langkah-langkah dalam menentukan sub kegiatan prioritas, antara lain:

1. Dalam menentukan sub kegiatan dan penyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan.
2. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling diperlukan untuk dilaksanakan.
3. Anggaran pada sub kegiatan merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan dari Pengguna Anggaran, sehingga setiap PPTK kegiatan mengetahui kewenangan dan kewajibannya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja pegawai dalam melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas ini dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2024, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas komunikasi dan informasi Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik		70 Persen	719.466.920	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		80 Persen	748.613.612
2. 16. 02. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat		13 Media	719.466.920	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Media	748.613.612
2. 16. 02. 2. 01. 0002.	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		4 Dokumen	47.432.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Dokumen	55.175.200
2. 16. 02. 2. 01. 0004.	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokumen	257.668.900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	251.435.790
2. 16. 02. 2. 01. 0005.	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		2 Dokumen	52.720.580	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	57.992.638
2. 16. 02. 2. 01. 0006.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 Dokumen	83.771.160	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	74.348.276
2. 16. 02. 2. 01. 0007.	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		4 Layanan	133.066.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Layanan	150.372.600
2. 16. 02. 2. 01. 0008.	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		2 Dokumen	118.810.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	130.691.000
2. 16. 02. 2. 01. 0011.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1 Dokumen	25.998.280	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	28.598.108
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE		95,52 Persen	3.529.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		97,01 Persen	2.684.630.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 16. 03. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah		32 PD	725.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 PD	825.000.000
2. 16. 03. 2. 01. 0002.	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1 Dokumen	110.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	110.000.000
2. 16. 03. 2. 01. 0003.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 Unit	615.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	715.000.000
2. 16. 03. 2. 02.	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		32 PD	2.804.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 PD	1.859.630.000
2. 16. 03. 2. 02. 0003.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	2.360.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	1.400.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 0007.	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		3 Unit	210.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Unit	210.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 0008.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		5 Layanan	100.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Layanan	100.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 0009.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	50.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	65.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 16. 03. 2. 02. 0010.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	48.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	48.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 0012.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	36.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	36.630.000
	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL								
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan data prioritas daerah		53,85 Persen	461.799.740	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		61,54 Persen	492.912.433
2. 20. 02. 2. 01.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota		100 Persen	461.799.740	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	492.912.433
2. 20. 02. 2. 01. 0001.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		3 Dokumen	51.432.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	52.507.919
2. 20. 02. 2. 01. 0002.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		32 Orang	33.066.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 Orang	35.372.600
2. 20. 02. 2. 01. 0003.	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		2 Dokumen	52.720.580	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	57.992.638
2. 20. 02. 2. 01. 0004.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		32 Orang	105.771.160	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 Orang	116.348.276
2. 20. 02. 2. 01. 0006.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		3 Dokumen	218.810.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	230.691.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BIDANG URUSAN PERSANDIAN								
2. 21. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah		21,88 Persen	81.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		28,13 Persen	95.500.000
2. 21. 02. 2. 01.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)		26,87 Persen	71.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		35,82 Persen	83.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 0001.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan		1,00 Dokumen	7.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	8.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 0002.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		1,00 Laporan	12.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	15.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 0003.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1,00 Laporan	50.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	55.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		5,00 Perangkat Daerah	2.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Perangkat Daerah	5.000.000
2. 21. 02. 2. 02.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi		47,88 Persen	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		63,51 Persen	12.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 21. 02. 2. 02. 0001.	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		5,00 Perangkat Daerah	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Perangkat Daerah	12.500.000
	NON URUSAN								
2. 16. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 Persen	7.445.840.340			95 Persen	7.071.006.955
2. 16. 01. 2. 01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	27.512.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	27.512.800
2. 16. 01. 2. 01. 0001.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	9.926.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 Dokumen	9.926.800
2. 16. 01. 2. 01. 0002.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	4.250.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.250.000
2. 16. 01. 2. 01. 0003.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	4.250.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	4.250.000
2. 16. 01. 2. 01. 0006.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	4.644.600	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	4.644.600
2. 16. 01. 2. 01. 0007.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	4.441.400	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	4.441.400
2. 16. 01. 2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	5.315.076.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	5.245.562.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 16. 01. 2. 02. 0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 orang / bulan	5.098.887.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil [DANA UMUM] - Pendapatan Asli Daerah (PAD) [DANA KHUSUS] - Dukungan Tambahan DAU Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		31 orang / bulan	5.026.503.000
2. 16. 01. 2. 02. 0003.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	211.320.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	213.720.000
2. 16. 01. 2. 02. 0005.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.089.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	1.089.000
2. 16. 01. 2. 02. 0007.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		12 Laporan	3.780.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	4.250.000
2. 16. 01. 2. 05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	80.700.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	85.700.000
2. 16. 01. 2. 05. 0002.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 paket	62.700.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	67.700.000
2. 16. 01. 2. 05. 0009.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	18.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 orang	18.000.000
2. 16. 01. 2. 06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	277.886.719	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	293.021.955

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 16. 01. 2. 06. 0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	8.864.764	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	9.000.000
2. 16. 01. 2. 06. 0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 paket	145.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 paket	145.000.000
2. 16. 01. 2. 06. 0005.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	27.541.955	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	27.541.955
2. 16. 01. 2. 06. 0006.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	8.880.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	8.880.000
2. 16. 01. 2. 06. 0009.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	70.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	85.000.000
2. 16. 01. 2. 06. 0011.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5 Dokumen	17.600.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	17.600.000
2. 16. 01. 2. 07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	300.865.648	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	459.657.200
2. 16. 01. 2. 07. 0005.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16 unit	67.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 unit	30.000.000
2. 16. 01. 2. 07. 0006.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 unit	233.865.648	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 unit	429.657.200
2. 16. 01. 2. 08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	1.337.096.427	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	852.553.000
2. 16. 01. 2. 08. 0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2. 16. 01. 2. 08. 0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.100.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	600.000.000
2. 16. 01. 2. 08. 0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	232.096.427	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	246.553.000
2. 16. 01. 2. 09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	106.702.746	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	107.000.000
2. 16. 01. 2. 09. 0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	36.702.746	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 unit	37.000.000
2. 16. 01. 2. 09. 0006.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		92 unit	60.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		92 unit	60.000.000
2. 16. 01. 2. 09. 0009.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 unit	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	10.000.000
					12.238.087.000				11.092.663.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2024, dengan demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT dan KUA PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang akan ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Pontianak yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan kewenangan perangkat daerah.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-Perangkat Daerah dan Renja, RKT Perangkat Daerah, maka dokumen Renja, RKT Perangkat Daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra Perangkat Daerah tersebut seperti isu-isu strategis, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sarannya.

Program Perangkat Daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPD/ RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT Perangkat Daerah harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra - Perangkat Daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu:

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2024.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.